



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN NEGERI RAHA**  
JL.M.H.THAMRIN NO.33 RAHA KAB. MUNA  
SULAWESI TENGGARA  
<http://www.pn-raha.go.id/>



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025**

**SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**NILAI INDEKS**

**4,00 / 100,00%**

Jumlah	80 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 35	
	PEREMPUAN : 45	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 0	Diploma 3 : 3
	SMU : 17	S1 : 58
	Diploma 1 : 0	S2 : 2
		S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 20	SWASTA : 16
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 1
	POLRI : 1	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 42	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	4,000
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	4,000
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	4,000

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Berdasarkan hasil survei dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada 3 (tiga) fokus perbaikan/tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil survei sebagai berikut :

Untuk Memperbaiki Indikator Manipulasi Peraturan, direkomendasikan:

- Agar petugas PTSP dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Raha sekarang sudah tidak menggunakan biaya radius yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan melainkan yang digunakan aplikasi sehingga biaya radius dapat diminimalisir;

Untuk memperbaiki Indikator Penyalahgunaan Jabatan, direkomendasikan:

- Petugas PTSP maupun petugas informasi selalu memberitahukan biaya yang dikenakan atas pengguna pelayanan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- Tanda Terima Pembayaran harus selalu diberikan kepada pengguna layanan.

Untuk memperbaiki Indikator Penyalahgunaan Jabatan, direkomendasikan :

- Ketua Pengadilan menegaskan bawah praktek penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Raha dalam pemberian layanan publik dan penanganan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Raha sudah tidak terjadi.
- Himbauan anti gratifikasi berdasarkan Lampiran SEMA Nomor 17 Tahun 2019 yang ditempel diatas Meja Majelis Hakim agar selalu dibaca oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan.

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

29 Desember 2025  
Ketua Pengadilan Negeri